

Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Mandiri Di Desa Kendaljaya Kabupaten Karawang

Siti Masitoh¹, Cucu Sugiarti²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang

121110631180038@student.unsika.co.id [2cucu.sugiarti@fisip.unsika.ac.id](mailto:cucu.sugiarti@fisip.unsika.ac.id)

Dikirim: 7 November 2024 Direvisi: 23 November 2024 Diterima: 14 Desember 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah mandiri di Desa Kendaljaya, Kabupaten Karawang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh Ripley dan Franklin. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumen kebijakan, dan artikel media massa. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan validasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah mandiri di Desa Kendaljaya belum mencapai hasil yang maksimal dalam hal kepatuhan, kelancaran, dan rutinitas fungsi, serta kinerja dan dampak di Desa Kendaljaya. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari semua pihak dan evaluasi dari pembuat kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini antara lain adalah ketidakpatuhan sepenuhnya terhadap instruksi Bupati Karawang dan banyaknya sampah dari masyarakat luar Desa Kendaljaya, yang menyebabkan anggaran Desa Kendaljaya melebihi batas yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Pengelolaan sampah, Masyarakat desa, Pemerintah desa

Abstract

This research aims to evaluate the implementation of the independent waste management policy in Kendaljaya Village, Karawang Regency, and identify the factors that influence the implementation of the policy. The research method used is qualitative with a case study approach, using the implementation model developed by Ripley and Franklin. Data were collected through interviews, observations, policy documents, and mass media articles. Data analysis was carried out through the stages of data collection, reduction, presentation, and validation. The results showed that the implementation of the independent waste management policy in Kendaljaya Village has not achieved optimal results in terms of compliance, smoothness, and routine functions, as well as performance and impact in Kendaljaya Village. Therefore, support from all parties and evaluation from policy makers are needed. Factors affecting the implementation of this policy include the lack of full compliance with the Karawang Regent's instruction and the large amount of waste from communities outside Kendaljaya Village, which caused Kendaljaya Village's budget to exceed the predetermined limit.

Keywords: policy implementation, waste management, village community, village government

PENDAHULUAN

Sampah merupakan masalah utama yang memerlukan solusi bersama untuk perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang (Ningsih, 2021). Oleh karena itu, pengelolaan sampah menjadi hal yang sangat krusial, sebagaimana dilaporkan oleh laman resmi Pemerintah Kabupaten Karawang karawangkab.go.id (2024). Kepala Dinas Lingkungan Hidup Karawang menyatakan bahwa persoalan sampah di Kabupaten Karawang cukup mengkhawatirkan, dengan produksi mencapai 900 ton per hari, sementara kapasitas pengangkutan hanya 400 hingga 500 ton per hari. Akibatnya, sampah yang tersisa sering tercecer dan dibuang di saluran air dan tempat lainnya. Jumlah penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2021 tercatat sebanyak 2.468,6 ribu jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 1.250.585 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.217.991 jiwa (karawangkab.go.id).

Peningkatan jumlah penduduk berpotensi meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan, sehingga menambah beban tugas pemerintah Kabupaten Karawang dalam pengelolaan sampah. Secara normatif, terdapat beberapa kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah, di antaranya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 09 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Disebutkan pada pasal 10 ayat (4) bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis wajib dilakukan dalam skala rukun tetangga, rukun warga, desa, kelurahan, dan/atau kecamatan dengan pembinaan teknis dari perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dan kebersihan. Meskipun kebijakan mengenai pengelolaan sampah telah lama dibuat, pelaksanaannya belum sesuai harapan karena tumpukan sampah masih sering ditemui di beberapa wilayah, khususnya di Desa Kendaljaya Kabupaten Karawang. Dalam hal ini, masyarakat belum sepenuhnya siap untuk berpartisipasi dalam pembangunan, terutama dalam pengelolaan sampah (Wulandari et al., 2017). Namun, dengan permasalahan sampah yang belum terselesaikan, pemerintah daerah Kabupaten Karawang mengeluarkan kebijakan lain untuk melibatkan pemerintah desa dalam menanggulangi masalah sampah, yaitu melalui surat edaran nomor 660.1/7687/DLHK/2019 tentang pengelolaan sampah mandiri di desa.

Pemerintah Kabupaten Karawang meminta semua desa untuk membuat dana untuk pengelolaan sampah secara mandiri. Ini berarti mereka akan memiliki tempat pembuangan sampah sementara, gerobak/pengumpul, kendaraan yang mengangkut sampah ke tempat pemrosesan akhir, dan alat pengelolaan sampah seperti pemilah, pencacah plastik, dan organik. Selain itu, mereka akan membentuk dan membangun bank sampah desa. Berdasarkan fakta di lapangan, kebijakan pengelolaan sampah mandiri di desa telah diimplementasikan di Desa Kendaljaya Kabupaten Karawang pada tahun 2023 dengan menyediakan gerobak/pengumpul sampah dan melakukan pengangkutan sampah setiap bulan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Karawang mengenai pengelolaan sampah mandiri di desa diimplementasikan serta menganalisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah desa dalam mengelola sampah mandiri di desa menarik

untuk diteliti, sebagai bentuk kontribusi sosial untuk membantu mengidentifikasi model pengelolaan sampah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kendaljaya, Kabupaten Karawang, pada bulan Januari 2024. Desa Kendaljaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena telah mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah mandiri, sehingga menjadi konteks yang relevan untuk dikaji lebih lanjut. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari aparat pemerintah Desa Kendaljaya, pengurus Karang Taruna, serta masyarakat yang terlibat dalam kebijakan pengelolaan sampah mandiri.

Kriteria pemilihan partisipan dilakukan secara purposive (Denzin & Lincoln, 2011) dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam implementasi kebijakan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa metode antara lain, wawancara mendalam dilakukan terhadap aparat desa, pengurus Karang Taruna, dan masyarakat guna memahami perspektif mereka mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah mandiri (lihat tabel 1). Kemudian observasi partisipatif dilakukan guna mengamati langsung praktik pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat, dan dokumentasi meliputi dokumen kebijakan desa terkait pengelolaan sampah, laporan kegiatan, serta artikel media massa yang membahas kebijakan ini.

Tabel 1. Karakteristik Partisipan

No.	Partisipan	Usia (Tahun)	Gender	Pendidikan	Lama Keterlibatan (Tahun)
1	Aparat Pemerintah Desa	35-50	L/P	S1/S2	3-5
2	Pengurus Karang Taruna	20-35	L/P	SMA/S1	1-3
3	Masyarakat	25-55	L/P	SMP/SMA	1-5

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles & Huberman (2014), yang melibatkan beberapa tahapan. Pertama, pengumpulan data yaitu data dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kedua, reduksi data, data yang diperoleh diklasifikasikan dan disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian. Ketiga, penyajian data, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk memudahkan interpretasi. Keempat, yaitu verifikasi dan validasi data, dengan cara melakukan triangulasi sumber (Creswell, 2014), yaitu membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan sampah mandiri di desa memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Keterlibatan

masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting, terutama dalam penerapan praktik pemilahan sampah organik dan non-organik di tingkat rumah tangga. Menurut teori partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik (Arnstein, 1969), keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat dapat berkontribusi dalam implementasinya. Oleh karena itu, kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri di desa menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan (Ostrom, 1990).

Di Kabupaten Karawang, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang, tetapi juga merupakan kewajiban kepala desa dalam memastikan kebersihan dan kelestarian lingkungan di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Untuk memperkuat implementasi kebijakan ini, Bupati Karawang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 660.1/768/DLHK/2019 pada 26 November 2019 mengenai pengelolaan sampah mandiri yang ditujukan kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Karawang (Pelitakarawang.com). Surat edaran ini merupakan upaya konkret dalam memberikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat, sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 9 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah atau pihak lain yang diberi tanggung jawab. Dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah mandiri di Desa Kendaljaya, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Ripley dan Franklin (1986). Model ini menekankan tiga indikator utama dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, kelancaran rutinitas fungsi dan kinerja, serta dampak yang dihasilkan. Pemilihan model ini didasarkan pada relevansinya dalam konteks birokrasi, di mana keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kepatuhan aparat pemerintah terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, model ini juga mempertimbangkan sejauh mana tujuan kebijakan dapat tercapai melalui efektivitas struktur birokrasi dalam mengelola sumber daya dan mengatasi hambatan implementasi (Hill & Hupe, 2014). Dengan demikian, analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah mandiri di Desa Kendaljaya akan berfokus pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik, faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Analisis Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan Yang Berlaku

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah mandiri di Desa Kendaljaya, Kabupaten Karawang, dapat diukur dari tingkat kepatuhan pemerintah Desa Kendaljaya, Kabupaten Karawang, dalam mematuhi mekanisme dan isi surat edaran nomor 660.1/768/DLHK/2019. Surat edaran tersebut merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Karawang pada tahun 2019, yang berisi instruksi bagi setiap desa untuk mengalokasikan dana desa guna kepentingan pengelolaan sampah mandiri di desa. Beberapa instruksi tersebut tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Intruksi Bupati Kabupaten Karawang

No	Jenis Intruksi	Tingkat kepatuhan
1	Menyediakan tempat pembuangan sampah sementara	Telah mematuhi
2	Menyediakan gerobak/pengumpul sampah,	Telah mematuhi
3	Menyediakan kendaraan pengangkut sampah untuk mengangkut sampah ke tempat pemrosesan akhir sampah	Telah mematuhi
4	Menyediakan media pengelolaan sampah yang terdiri dari mesin pemilah sampah, mesin pencacah plastik dan mesin pencacah organik	Belum mematuhi
5	Pembentukan dan pengembangan bank sampah desa	Belum mematuhi

Sumber: Pelitakarawang.com

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 2, terlihat bahwa Pemerintah Desa Kendaljaya belum sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah mandiri sesuai dengan Surat Edaran Bupati Karawang. Informasi dari para partisipan menunjukkan bahwa desa ini belum menyediakan sarana dan prasarana utama untuk pengelolaan sampah, seperti mesin pemilah sampah, mesin pencacah plastik, dan mesin pencacah organik. Selain itu, pembentukan serta pengembangan bank sampah desa juga belum terealisasi. Namun demikian, terdapat beberapa aspek dari kebijakan yang telah diimplementasikan, termasuk penyediaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS), pengadaan gerobak pengangkut sampah, serta kendaraan operasional untuk mengangkut sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dalam mengelola sampah secara mandiri, masih terdapat tantangan dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Analisis Kelancaran Rutinitas Fungsi

Ketidakadaan masalah dalam implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kelancaran fungsi rutin yang dikelola dengan baik. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, pengelolaan sampah mandiri di Desa Kendaljaya belum dapat dikatakan optimal karena belum sepenuhnya mematuhi mekanisme dan instruksi yang tercantum dalam surat edaran Bupati Kabupaten Karawang, serta sering muncul permasalahan baru di Desa Kendaljaya itu sendiri. Masalah yang dihadapi oleh Desa Kendaljaya dalam pengelolaan sampah mandiri cukup signifikan. Kepala Desa Kendaljaya menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah mandiri di Desa Kendaljaya telah dimulai pada tahun 2023, namun saat ini telah dihentikan oleh pemerintah Desa Kendaljaya. Penghentian pengelolaan sampah mandiri di desa dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan karena adanya permasalahan baru.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan partisipan, diperoleh informasi mengenai faktor utama yang memengaruhi penghentian implementasi kebijakan pengelolaan sampah mandiri di desa. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang tinggal di luar Desa Kendaljaya yang turut membuang sampah pada gerobak sampah yang dikhususkan untuk masyarakat Desa Kendaljaya, sehingga anggaran yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kendaljaya semakin bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Pemerintah Desa Kendaljaya menganggarkan pengangkutan sampah sebanyak dua kali dalam kurun waktu sebulan, namun yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan rencana pemerintah karena semakin banyak masyarakat yang membuang sampah ke gerobak yang telah disediakan. Terlebih dalam waktu seminggu diharuskan melakukan pengangkutan sampah, maka dari itu anggaran yang diperlukan berada di luar perencanaan pemerintah sebelumnya.

Analisis Dampak Dan Kinerja Yang Dikehendaki

Implementasi kebijakan yang berhasil mengacu pada tercapainya kinerja yang diinginkan dan dampak kebijakan yang diinginkan dari semua isi kebijakan yang ada. Adanya kebijakan Bupati Karawang berupa surat edaran pengelolaan sampah mandiri berdampak pada beberapa hal, seperti dampak pada lingkungan, dampak kepada masyarakat serta dampak kinerja kebijakan terhadap pemerintah Desa Kendaljaya (Armadi, 2014). Pertama, dampak terhadap lingkungan dari adanya pengelolaan sampah mandiri di desa dapat mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh pembakaran sampah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kendaljaya, selanjutnya desa dapat memajemen pengelolaan sampahnya secara mandiri untuk meningkatkan kualitas hidup dan penerapan lingkungan yang sehat. Dampak pada lingkungan belum terlaksana secara optimal mengingat Pemerintah Desa Kendaljaya telah memberhentikan pengelolaan sampah secara mandiri oleh karenanya diperlukan solusi dari pemerintah Kabupaten Karawang guna memastikan setiap desa melaksanakan kebijakan yang telah dibuat.

Kedua, dampak kepada masyarakat dapat dilihat dari tujuan kebijakannya itu sendiri yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan sarana maupun fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat, dengan adanya fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam menjaga lingkungan serta memanfaatkan sarana dengan sebaik-baiknya guna meminimalisir penyebaran sampah di lingkungan sekitar Desa Kendaljaya.

Ketiga, dampak kinerja kebijakan yang dikehendaki oleh pemerintah Desa Kendaljaya Kabupaten Karawang, kinerja kebijakan belum dirasa optimal karena belum mematuhi semua intruksi Bupati Kabupaten Karawang yang terdapat dalam surat edaran dan adanya masalah yang dihadapi oleh desa kendaljaya sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah mandiri di desa seharusnya masih dilaksanakan namun saat ini telah diberhentikan mengacu pada permasalahan yang ada. Di samping itu, pemerintah Desa Kendaljaya telah berupaya serta berkontribusi penuh dalam menjalankan kebijakan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Namun demikian menurut pihak DLHK Kabupaten Karawang meskipun sosialisasi tentang pengelolaan sampah mandiri telah dilaksanakan di akhir tahun 2019 lalu, belum dapat diimplementasikan secara maksimal oleh APDes di masing-masing desa. Mereka menganggap bahwa tanggungjawab pengelolaan sampah maupun kebersihan merupakan tanggung jawab pihak pemerintah kabupaten dan bukan wilayah pemerintahan desa (pelitakarawang.com).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah mandiri di Desa Kendaljaya, Kabupaten Karawang, belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pemerintah desa terhadap kebijakan yang berlaku, kelancaran pelaksanaan fungsi rutin, serta efektivitas kinerja dan dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Meskipun demikian, salah satu keberhasilan dari penerapan kebijakan ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah melalui pelatihan yang diberikan oleh pemerintah desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini antara lain belum terpenuhinya seluruh instruksi yang tercantum dalam Surat Edaran Bupati Karawang Nomor 660.1/768/DLHK/2019. Selain itu, muncul permasalahan tambahan berupa keterlibatan masyarakat dari luar Desa Kendaljaya yang turut membuang sampah pada fasilitas pengelolaan yang sebenarnya diperuntukkan bagi warga desa setempat. Sebagai rekomendasi, pemerintah Kabupaten Karawang perlu meningkatkan sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah mandiri secara lebih intensif dan sistematis kepada seluruh desa di wilayahnya. Selain itu, evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta memberikan dampak yang optimal bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Akbar, F. H., Aditya, I., & Ramdani, R. (2023). TANTANGAN DAN PERAN PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI ERA DISRUPSI KOMPETENSI TENAGA KERJA. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 380-387. <http://dx.doi.org/10.25157/dak.v10i2.11357>
- Armadi, N. M. (2021). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai kunci keberhasilan dalam mengelola sampah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9-24. <https://doi.org/10.52318/jisip.2021.v35.1.2>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Cahyadi, A., Sriati, S., & Al Fatih, A. (2018). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di kabupaten Purbalingga. *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS)*, 2(2), 20-24.
- Diman, K., Burhan, N., Hakim, M. F., & Efendi, R. (2022). Pengolahan Sampah Plastik Menggunakan Mesin Crusher Untuk Digunakan Pada Masyarakat Batujaya Kabupaten Karawang: Indonesia. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(11), 1354-1361.
- Diskominfo Kabupaten Karawang. (2019, April 2). *DLHK Kab.Karawang Akan Siapkan Aturan Untuk Mengurangi sampah plastik*. Situs Resmi - Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. <https://karawangkab.go.id/berita/dlhc-kabkarawang-akan-siapkan-aturan-untuk-mengurangi-sampah-plastik-0>
- Diskominfo Kabupaten Karawang. (2020, April 17). *Permasalahan Sampah Dalam Pandemi Covid-19, Karawang Usulkan Empat TPST Baru*. Situs Resmi - Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. <https://karawangkab.go.id/berita/permasalahan-sampah-dalam-pandemi-covid-19-karawang-usulkan-empat-tpst-baru>
- Djani, W., Wadu, J., & Lake, P. (2019). Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup Kota Kupang. *Journal of Business Studies*, 4(2), 50-67.

- Hastuti, B. D., Anwar, F., & Titi, T. D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(2), 92-101. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v2i2.70>
- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (2nd ed.). Routledge.
- Mahpudin, E., Batu, R. L., & Putri, Z. A. N. (2022). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Karawang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 87-93. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3392>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). **Qualitative data analysis: A methods sourcebook** (3rd ed.). Sage Publications.
- Natalia, L., Wihardja, H., & Ningsih, P. W. (2021). Pendampingan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dengan konsep 3R di desa Sukaluyu. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 4(1), 21-26. <https://doi.org/10.33330/jurdimas.v4i1.856>
- Nihala, K. G. (2020, October 22). *Desa di karawang bisa melakukan Pengelolaan Sampah Mandiri*. [pelitakarawang.com](https://www.pelitakarawang.com). <https://www.pelitakarawang.com/2020/10/desa-di-karawang-bisa-melakukan.html>
- Nugroho, Riant 2014, *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Puspa, L., & Darmi, T. (2021). Analisis kebijakan pengelolaan sampah pada dinas lingkungan hidup. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 2(2), 45-55. <https://doi.org/10.31539/joppa.v2i2.2083>
- Sari, G. L., Hadining, A. F., Laksono, R. A., Rohmana, A. S., & Wicaksono, B. A. (2023). Peningkatan Pemanfaatan Sampah Organik Sebagai Pakan Maggot Melalui Penggunaan Mesin Pencacah Sampah Organik Di Bank Sampah Desa Bengle Kabupaten Karawang. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 227-232. <http://dx.doi.org/10.31604/jpm.v6i1.227-232>
- Sulistiyani, A. T., & Wulandari, Y. (2017). Proses pemberdayaan masyarakat Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dalam pembentukan kelompok pengelola sampah mandiri (KPSM). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 2(2), 146-162. <https://doi.org/10.22146/jpkm.27024>